

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Fadillah, Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional, Elsam, 2007, Jakarta.

Andrey Sujatmoko, 2005, Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia.

Alo Liliveri, 2005, Prasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Multikultur, Lkis Yogyakarta,

Budiardjo, Miriam, 2000. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia. Jakarta.

C.F Strong. 2004. *Modern Political Constitutions: An Intrudiction to the Comparative Study of Their History and Exisiting Form*, London: *The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limetid*. 1966. Terjemahan Indonesia, C.F. Strong. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern (Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konsitusi Dunia)*. Nusamedia. Bandung.

Eddy Pratomo. 2018. *Hukum Perjanjian Internasional*. PT Flex Media Komputindo. Jakarta.

Edy Suryono. 1984. *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*. Remadja Karya. Bandung.

Franz Magnis Suseno. 2001. *Etika Politik (Prinsip-Prinsip Moral Kenegaraan Modern)*. PT. Gramedia. Jakarta.

Harkristuti Harkrisnowo (dkk), 2012, Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Mekanisme Penanganannya, Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Hernadi Affandi, 2013, *Hak Asasi Manusia, Pemerintahan yang Baik, dan Demokrasi di Indonesia*, CV Kencana Salakadomas, Bandung.

- Hesti Armiwulan Sochmawardiah, 2013, *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM : Studi tentang Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa*, Genta Publishing, Yogyakarta. Penerapannya, Rajawali Pers.
- Hotma P. Sibuea. 2014. *Ilmu Negara*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- ICJ (The International Commission and Amnesty International) dalam Muhammad Ashri, 2018, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 85
- I Dewa Gede Atmadja. 2012. *Ilmu Negara Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*. Ctk. Pertama. Setara Press. Malang.
- I D. G. Palguna, 2019, *Hukum Internasional : Aspek-Aspek Teoritik dan*
- Iin Karita Sakharina, 2016, *Kewajiban Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kecukupan Pangan yang Layak di Indonesia: Suatu Tinjauan Terhadap Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 47-48
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Ismail Nawawi. 2009. *Public Policy*. ITS Press. Surabaya.
- I Wayan Parthiana, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar, Mamuju, hlm. 309 Dalam Veriana, 2016.
- Janner Simarmata (dkk), 2021, *COVID-19: Seribu Satu Wajah*, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Bambang iriana Djajaatmadja (Penerjemah). 1989. *Pengantar Hukum Internasional*. J.G Starke. Sinar Grafika. Jakarta.
- John O brien, 2001, *International Law*, Cavendish Publishing Limited, London

- Majda El Muhtad. 2015. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Edisi ke-2. Kencana. Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmaja. 1982. *Buku 1 Bagian Umum. Pengantar Hukum Internasional*. Binacipta. Jakarta.
- Nalom Kurniawan Barlyan, 2019, *Dinamika HAM dan Tanggung Jawab Negara*, Rajawali Pers, hlm.45
- Nany Suryawati. 2020. *Hak Asasi Politik Perempuan*. Ideas Publishing. Gorontalo.
- Ni'matul Huda. 2003. *Politik Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. GH UII Press. Yogyakarta.
- Nurul Qamar. 2014. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Peter Mamud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Purwasito (dkk), 2003, *Komunikasi Multikultur*, UMS Press, Surakarta.
- Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. ElexMedia Komputindo. Jakarta
- Syahrudin Nawi, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT Umitoha Ukhwuah Grafika, Makassar.
- Sepriani. 2014. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Solichin Abdul Wahab. 2014. *Analisis Kebijakan*. Bumi aksara. Jakarta.
- Suratman Dkk, 2019, *Hukum dan Kebijakan Publik*, PT Refika Aditama, Bandung.

Tito Edy Priandono, 2014, *Komunikasi dalam Keberagaman*, Departemen Ilmu Komunikasi, FPIPS UPI, Bandung.

Widiada Gunakaya, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Jurnal

Aprista Ristyawati. "*Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*". *Administrative Law & Governance Journal*. Fakultas Hukum Undip. Vol. 3. Issue 2 Juni 2020.

Birkah Latif, 2020, *Pandemic Corona (Covid-19) and Health Law Protection*, *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, Vol. 14, No. 4, October-December 2020.

Dentria Cahya Sudarsa, "*Perlindungan Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Perempuan Dan Anak Di Wilayah Yang Mengalami Konflik Bersenjata*", *Kertha Negara*, Vol 05 No. 04. Oktober 2017.

Dina Sunyowati, "*Hukum Internasional sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Nasional*", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 2 No 1, Maret 2013.

Harvini Lazi Dkk, 2017, "*Deteksi Warna Kulit Menggunakan Model Warna Cielab Neural Network Untuk Identifikasi Ras Manusia (Studi Kasus Ras: Kaukasoid, Mongoloid, dan Negroid)*", *Jurnal Rekursif*, Vol. 5 No. 2, Juli 2017

Hernadi Affandi, "*Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945*", *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 1 No. 2, Juni 2017.

Hesti Armiwulan, *Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015.

lin Karita Sakharina (dkk), "*Acces Rights to Health Services for Tolotang Believers as Minority Group, Sidrap District, Indonesia,*" *Indian Journal of Forensic & Toxicology*, Vol. 15 No. 2, April-Juni 2021.

Raithah Noor Sabandiah, "*Diskriminasi Terhadap Agama Tradisional Masyarakat Hukum Adat Cigugur (Discrimination against Traditional Beliefs of Cigugur Indigenous Community)*", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 18 No. 3, September 2018. Hlm. 335-352

Melda Kamil Ariadno. "*Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional*". *Indonesian Journal of International Law*. Vol. 5 Nomor 3 2008. Sefrini, 2005, Pemohon Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional (Studi Kritis Terhadap ILC Draft On State Responsibility 2001), *Jurnal Hukum*, Vol. 12. No.30. Hllm 193-209.

Muhammad Heikal Daudy,2013, "*Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelarangan Menyeluruh Ranjau Anti-Personel di Indonesia dalam Konflik Bersenjata di Aceh*" , *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No.60, Th XV, Hlm. 246-246

Sefrini, "*Pemohon Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional (Studi Kritis Terhadap ILC Draft on State Responsibility 2001)*", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.12. No.30, September 2017

Sigit Riyanto,2012, "*Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*", *Yusitisia* Vol.1 No. 3, hlm 5-14.

Veriena J.B. Rehatta, 2016, *Indonesia Dalam Penerapan Hukum Aliran Monisme, Dualisme dan Campuran*, *Jurnal Sasi* Vol. 22 No. 1, Januari-Juni 2016.

Internet

Achmad Reyhan Dwianto, "Arti Lockdown, Bedanya dengan Isolasi dan Karantina", *Detikcom*.13 Maret 2020. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4938298/arti-lockdown-bedanya-dengan-isolasi-dan-karantina> diakses pada 1 April 2021.

- Badan Pekerja Kontras, "Wabah COVID-19 Bukan Alasan untuk Mengorbankan HAM dan Demokrasi", KontraS, 11 Mei 2020, <https://kontras.org/2020/05/11/15985/> diakses pada 18 April 2021.
- Bonardo Maulana Wahono (dkk), "TOWANI TOLOTANG Komunitas Hindu tanpa pura Agama lokal Suku Bugis yang memilih berafiliasi dengan Hindu ini pernah terancam pemusnahan. Menolak punya pura", Lokadata, 9 April 2018, <https://lokadata.id/artikel/komunitas-hindu-tanpa-pura> diakses pada 17 April 2021.
- Ester Indahyani Jusuf, "Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Racial Sebuah Kajian Hukum Tentang Penerapannya Di Indonesia", ELSAM Referensi HAM, 6 Oktober 2014, <https://referensi.elsam.or.id/2014/10/konvensi-internasional-tentang-penghapusan-segala-bentuk-diskriminasi-racial-sebuah-kajian-hukum-tentang-penerapannya-di-indonesia/> diakses pada 16 Juli 2021.
- Fathiyah Wardah, "Diskriminasi Racial, Persoalan Mendasar di Papua", VOA Indonesia, 21 Juni 2020, <https://www.voaindonesia.com/a/diskriminasi-racial-persoalan-mendasar-di-papua/5471179.html> diakses pada 16 Juli 2021.
- Fitria Chusna Farisa, "UPDATE 21 Maret: Bertambah 4.396, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 1.460.184", Kompas.com, 21 Maret 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/21/17391291/update-21-maret-bertambah-4396-kasus-covid-19-di-indonesia-jadi-1460184> diakses pada 15 April 2021.
- Kementrian Kesehatan, "Informasi tentang Virus Corona (Covid 19)", 25 Januari 2020 diakses melalui <https://promkes.kemkes.go.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus> pada 19 agustus 2021.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERKAIT WABAH COVID-19", 22 April 2020, <https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-wabah-covid-19> diakses pada 15 Juli 2021.

Komnas HAM, "Komnas HAM: Diskriminasi Ras dan Etnis Berpotensi Membesar", 14 September 2019, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/9/14/1155/komnas-ham-diskriminasi-ras-dan-etnis-berpotensi-membesar.html> diakses pada 15 Juli 2021.

Icha Rastika, "UPDATE 21 Maret: Bertambah 4.396, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 1.460.184", Kompas.Com, 21 Maret 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/21/17391291/update-21-maret-bertambah-4396-kasus-covid-19-di-indonesia-jadi-1460184>, diakses pada 16 April 2021.

Mela Arnani, "Kasus Pertama Virus Corona di China Dilacak hingga 17 November 2019", Kompas.com. 13 Maret 2020 <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/13/111245765/kasus-pertama-virus-corona-di-china-dilacak-hingga-17-november-2019?page=all> diakses pada 1 April 2021.

Nur Rohmi Aida, "Update, Berikut 15 Negara yang Berlakukan Lockdown akibat Virus", Corona.Kompas.22 Maret 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/22/183000465/update-berikut-15-negara-yang-berlakukan-lockdown-akibat-virus-corona?page=all> diakses pada 1 April 2021.

Suci Sekarwati. Ini 13 Negara yang Masih Lockdown. Tempo.Co. 18 Januari 2021. <https://dunia.tempo.co/read/1424235/ini-13-negara-yang-masih-lockdown> diakses pada (5 April 2021).

Tim detikcom, "Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?", detikNews. 26 April 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri/3> diakses pada 16 April 2021.

Wahyu Setiawan, "Tak Hanya Fokus ke Kota Besar, Pemerintah Diminta Perhatikan Penanganan Covid-19 di Desa", KBR.Id, 29 April 2020, https://kbr.id/nasional/04-2020/tak_hanya_fokus_ke_kota_besar__pemerintah_diminta_perhatikan_penanganan_covid_19_di_desa/103044.html diakses pada 16 April 2021

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
<https://www.ohchr.org/Documents/Professionalinterest/ccpr.pdf>
diakses pada 21 April 2021.

Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
<https://referensi.elsam.or.id/wpcontent/uploads/2014/09/Kovenan-Internasional-Hak-Ekonomi-Sosial-dan-Budaya.pdf> diakses
pada 19 desember 2020.

Skripsi

Jihan Annisa Mujaddidah, 2021, "*Pemenuhan Hak Narapidana Terhadap Pelayanan Kesehatan di Lapas Kelas IIB Polewali Mandar di Tengah Pandemi Covid-19*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

James Handuk, 2014, "*Analisis Yuridis Atas Perlakuan Rasisme Berdasarkan Internasional Convention On The Elimination Of All Form Racial Discrimination 1965: Studi Kasus Diskriminasi Racial Terhadap Etnis Uighur di China*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi
Ras Dan Etnis.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan
Penyakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pengendalian
Penyakit Menular.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintahan Daerah.